

Mumuh Muhsin Z.

PRIANGAN
dalam Arus Dinamika Sejarah

MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA
CABANG JAWA BARAT PRESS
BANDUNG
2011

PRIANGAN DALAM ARUS DINAMIKA SEJARAH

oleh: Mumuh Muhsin Z.

Copyright © 2011 by Mumuh Muhsin Z.

Penerbit

Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat Press
d.a.Prodi Ilmu Sejarah FIB Unpad
Jl. Raya Jatinangor-Sumedang km 21 Jatinangor

Editor: Miftahul Falah, M.Hum.

Layout: Miftahul Falah, M.Hum.

Desain Sampul: Yulianti, S.Kom.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muhsin Z., Mumuh

Priangan dalam Arus Dinamika Sejarah/Mumuh Muhsin Z.

viii + 160 hlm. ; 15,5 x 23 cm.

ISBN 978-602-7859-05-0

1. *Priangan dalam Arus Dinamika Sejarah* I. Judul

II. Falah, Miftahul.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memper-banyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGATAR

Buku ini merupakan kumpulan tulisan, tepatnya makalah, yang dipresentasikan dalam beberapa *moment* dan untuk kepentingan yang berbeda-beda. Selain itu, dalam buku ini terdapat juga tulisan-tulisan yang berasal dari artikel-artikel yang pernah dimuat di beberapa jurnal. Makalah dan artikel yang menjadi bahan baku buku ini merupakan salah satu kegiatan keilmuan penulis dari tahun 2007 hingga 2011. Di dalamnya terdapat 6 tulisan. Dari tulisan aslinya, beberapa tulisan yang ada dalam buku ini sudah mengalami banyak perubahan, penambahan, dan penyempurnaan.

Munculnya ide membukukan makalah-makalah dan artikel-artikel tersebut adalah supaya tulisan-tulisan yang pernah saya buat mempunyai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Bila makalah-makalah dan artikel-artikel tersebut dibiarkan begitu saja, apa adanya sebagai makalah dan artikel, tentu kemanfaatannya akan sangat terbatas karena hanya akan diketahui oleh para peserta seminar dan pembaca tertentu saja. Akan tetapi setelah dibukukan diharapkan bisa dibaca dan dikaji oleh sebanyak mungkin orang sekaligus pikiran-pikiran penulis akan lebih terdokumentasikan dan tersebar dengan lebih baik. Risiko yang sulit dihindarkan dari karya kompilasi seperti ini adalah terdapatnya sedikit “irisan” atau sedikit pengulangan pada beberapa judul.

Penulis beranggapan bahwa tulisan ini cukup berhasil bila pikiran-pikiran yang ada dalam tulisan ini menginspirasi para pembaca untuk menindaklanjutinya dengan pencarian atau penelitian lebih lanjut.

Harapan penulis, di tengah-tengah kekurangan yang masih ada, semoga buku ini bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Bandung, Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Hlm.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
SUMBER TULISAN	vii
PENDAHULUAN	1
I. Terbentuknya Keresidenan Priangan	3
II. Priangan Abad ke-19; Tinjauan Sejarah dan Demografi	29
III. Struktur Sosial, Politik, dan Pemilikan Tanah di Priangan Abad ke-19	45
IV. Dinamika Sosial-Ekonomi Priangan Abad ke-19	67
V. Penyebaran Islam di Priangan	83
VI. Perkembangan Tasawwuf Modern di Priangan	105
DAFTAR SUMBER	113

SUMBER TULISAN

“Terbentuknya Keresidenan Priangan”, Makalah Disajikan dalam Seminar Akademik di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Tanggal 15 Desember 2009.

“Priangan Abad ke-19; Tinjauan Sejarah dan Demografi”, *Metahumaniora*, Vol. 1, Nomor 4, April 2010; hlm. 367 – 378.

“Struktur Sosial, Politik, dan Pemilikan Tanah di Priangan Abad ke-19”, *Patanjala* Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol. 3 No. 3 September 2011; hlm. 386-401.

“Dinamika Sosial-Ekonomi Priangan Abad ke-19”, *Sosiohumaniora*, Vol. 13, No. 1, Maret 2011; hlm. 96 – 107.

“Penyebaran Islam di Priangan” dimuat dalam Nina Herlina Lubis *et al.* 2011. *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat* (Bandung: Yayasan MSI Jawa Barat) dengan judul “Islamisasi Daerah Pedalaman Tatar Sunda”, hlm. 16-28.

“Perkembangan Tasawwuf Modern di Priangan” dimuat dalam Nina Herlina Lubis *et al.* 2011. *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat* (Bandung: Yayasan MSI Jawa Barat) dengan judul “Tasawwuf Modern”, hlm. 336-346.

PENDAHULUAN

Priangan sesungguhnya sudah hampir menjadi “sejarah”. Bila saja tahun 1620 dianggap sebagai awal penggunaan kata Priangan sebagai nama wilayah geografis dan tahun 1964 sebagai batas akhir (seiring dengan penghapusan level administrasi keresidenan sehingga nama Keresidenan Priangan pun dihapus), berarti Priangan sebagai nama geografis-administratif hanya berumur sekitar 344 tahun. Namun demikian, “Priangan” sebagai nama acuan kultural-emosional masih tetap hidup sampai sekarang. Nama “Priangan” digunakan sebagai nama institusi perguruan tinggi, seperti Universitas Katolik **Parahiyangan** (Unpar); atau, ada lirik lagu mars yang sangat populer yang di dalamnya ada kata Priangan, seperti “Halo, halo Bandung. Ibu kota **Periangan...**”; di Kota Bandung pun ada sebuah hotel yang bersejarah bernama Hotel “**Preanger**”. Selain itu terdapat media massa/media sosial bernama *Warta **Priangan***, dan sebagainya. Penggunaan nama Priangan seperti ini dapat mengabadikan istilah Priangan yang sudah menjadi sejarah itu dalam memori kolektif manusia Sunda khususnya dan manusia Indonesia umumnya.

Bila dibandingkan dengan istilah Jawa Barat, istilah Priangan jauh lebih tua. Istilah Jawa Barat resmi digunakan untuk sebutan wilayah administratif provinsi pada tahun 1925/1926. Ketika istilah Jawa Barat dipakai sebagai wilayah administrasi provinsi, Priangan hanyalah menjadi salah satu keresidenan di antara keresidenan-keresidenan lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Keresidenan-keresidenan lainnya itu antara lain adalah Banten, Cirebon, dan Bogor.

Nama “Priangan” pun erat berkaitan dengan nama “Sunda”. Priangan sering diidentikkan dengan Sunda. “Sunda

adalah Priangan, Priangan adalah Sunda". Pengidentikan ini lebih didasarkan pada kesamaan aspek kultural dan cakupan wilayah geografis. Perbedaannya hanya terletak pada bahwa yang pertama terdapat muatan administratif/pemerintahan, pada yang kedua tidak ada.

Sepanjang perjalanan sejarahnya, setidaknya, terdapat lima momentum historis berkait dengan Priangan. Pertama, fase antara 1620 hingga 1677. Pada fase ini Priangan berada di bawah kontrol Kesultanan Mataram. Kedua, fase antara 1677 hingga 1799. Pada fase ini Priangan berada di bawah penguasaan VOC. Ketiga, fase antara 1800 hingga 1942. Pada fase ini Priangan berada di bawah penguasaan penjajahan Hindia Belanda. Keempat, periode 1942 hingga 1945 Priangan berada di bawah Pendudukan Jepang. Terakhir, periode setelah kemerdekaan hingga 1964. Pada masing-masing fase tersebut terjadi banyak dinamika di berbagai bidang kehidupan. Dalam batas-batas tertentu dinamika yang terjadi sepanjang tahun-tahun tersebut dibahas dalam buku yang merupakan kumpulan makalah ini.

I

TERBENTUKNYA KERESIDENAN PRIANGAN

Runtuhnya Kerajaan Pajajaran

Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 panggung sejarah Indonesia, khususnya Jawa, ditandai oleh dua fenomena yang menarik, yaitu melemahnya, atau bahkan runtuhnya kerajaan-kerajaan lama yang bercorak Hindu-Budha dan munculnya Islam sebagai kekuatan politik baru yang menunjukkan pengaruh yang kian membesar. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh sekitar tahun 1527 (Ricklefs, 1992: 26), di Pulau Jawa hanya terdapat dua kerajaan Hindu yang masih berdiri, yaitu Kerajaan Sunda Pajajaran di Jawa Barat dan Kerajaan Blambangan di Pasuruan, Jawa Timur. Setelah Kerajaan Blambangan ditaklukkan oleh Demak (1546), Kerajaan Pajajaran merupakan satu-satunya kerajaan Hindu yang masih berdiri (Kartodirdjo, 1987: 31).

Setelah menilai Islam sebagai bahaya laten yang dapat mengancam eksistensinya, Kerajaan Sunda Pajajaran berupaya mengantisipasinya dengan menerapkan dua macam kebijakan. Pertama, Sang Ratu Jayadewata (Raja Kerajaan Sunda Pajajaran) berusaha membatasi pedagang muslim yang akan singgah di pelabuhan-pelabuhan milik kerajaannya.¹ Upaya ini dilakukan

¹Diberitakan oleh Tome Pires bahwa kerajaan yang mempunyai luas sepertiga Pulau Jawa ini memiliki enam pelabuhan utama, yaitu *Bantam* (Banten), *Pomdam* (Pontang), *Chequide* (Cikande), *Tanggaram* (Tangerang), *Calapa* (Sunda Kalapa), dan *Cimanok* (Cimanuk) (Cortessao, 1944). Mengingat luasnya wilayah dan banyaknya pelabuhan yang dimiliki yang letaknya tersebar dan jauh dari pusat pemerintahan, hal ini menyulitkan pemerintah pusat untuk melakukan

untuk mengurangi pengaruh Islam yang akan diterima oleh para pedagang pribumi ketika melakukan kontak perdagangan dengan para pedagang muslim. Namun demikian, upaya tersebut kurang mendatangkan hasil yang memuaskan karena pada kenyataannya pengaruh Islam jauh lebih kuat dibandingkan upaya pembatasan yang dilakukan oleh Raja Sunda Pajajaran tersebut. Bahkan pengaruh Islam mulai memasuki daerah pedalaman Kerajaan Sunda Pajajaran sehingga kekhawatiran hancurnya negara semakin besar di kalangan penguasa Kerajaan Sunda Pajajaran.

Upaya kedua yang dilakukan oleh Kerajaan Sunda Pajajaran dalam rangka membatasi pengaruh Islam di negaranya adalah mencari mitra koalisi dengan negara yang dipandang memiliki "ideologi" dan kepentingan yang sama dengan Kerajaan Sunda Pajajaran. Mengetahui bahwa di Malaka telah berkuasa bangsa Portugis yang juga memusuhi Islam, Sang Ratu Jayadewata memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan Portugis. Hanya persahabatan dengan Portugislah, Kerajaan Sunda dapat mengimbangi kekuatan pasukan Kesultanan Demak dan Cirebon yang sedang berupaya menyebarkan Islam di Tatar Sunda. Dengan persahabatan ini pun, pengaruh Islam yang dibawa oleh para pedagang Muslim akan mampu dikontrol dengan ketat (Ekadjati *et al.*, 1990: 23; Hall, 1988: 214).

Untuk mewujudkan persahabatan tersebut, pada tahun 1512 Sang Ratu Jayadewata² mengirim beberapa utusannya ke

pengawasan secara efektif. Lebih-lebih Kerajaan Sunda Pajajaran memberlakukan sistem otonomi cukup luas kepada para penguasa lokal kerajaan-kerajaan kecil sebagai vasalnya.

² Dalam Prasasti Batutulis dan *Carita Parahyangan*, raja Sunda tersebut bernama Prabu Guru Dewataprana Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990²: 369).

Malaka di bawah pimpinan Ratu Samiam.³ Mereka berusaha meyakinkan bangsa Portugis bagi suatu persahabatan yang saling menguntungkan antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Ratu Samiam memberikan informasi bahwa sejak Portugis berkuasa di Malaka pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Sunda berkembang dengan pesat sehingga cukup memegang peranan penting dalam jalur perdagangan di Nusantara. Oleh karena itu, Ratu Samiam memberikan penawaran kepada Portugis untuk melakukan perdagangan secara bebas di pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Sunda. Sebagai imbalannya, Ratu Samiam mengharapkan bantuan militer dari Portugis apabila Kerajaan Sunda diserang oleh Kerajaan Demak-Cirebon (Hageman. 1867: 210).

Satu tahun kemudian, tepatnya sekitar Bulan Maret-Juni 1513, Alfonso d'Albuquerque (penguasa Malaka) mengirim empat buah kapal untuk melakukan ekspedisi ke Pesisir Utara Pulau Jawa. Ekspedisi ini bertujuan untuk membuktikan informasi yang disampaikan oleh Ratu Samiam berkenaan dengan peranan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa dalam jalur perdagangan di Nusantara. Ekspedisi ini pun bertujuan untuk melakukan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Mereka kemudian menyinggahi beberapa pelabuhan milik Kerajaan Sunda dan menyaksikan betapa ramainya pelabuhan-pelabuhan tersebut disinggahi oleh para

³Dalam tradisi lokal, pimpinan utusan itu bernama Ratu Sangiang-satu Sang Prabu Surawisesa yang berkedudukan di daerah Sangiang yaitu daerah yang terletak di sekitar Jatinegara sekarang memanjang sampai ke laut. Sangat dimungkinkan ia seorang putra mahkota yang berkuasa di Pelabuhan Kalapa. Dengan demikian, sangat dimungkinkan bahwa Ratu Samiam ini identik dengan Prabu Surawisesa yang memerintah Kerajaan Sunda sejak tahun 1521 seperti yang diceritakan dalam *Carita Parahyangan* (Atja, 1968: 75-76; Ekadjati, *et al.*, 1990: 92).

pedagang dari berbagai bangsa. Dengan demikian, orang-orang Portugis merupakan orang Eropa pertama yang mendatangi wilayah Tatar Sunda.

Perjanjian yang disepakati antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Isi perjanjian itu adalah:

- (1) Portugis dapat mendirikan benteng di Pelabuhan Sunda Kalapa;
- (2) Raja akan memberikan lada sebanyak yang dibutuhkan Portugis sebagai penukaran barang-barang kebutuhan Kerajaan Sunda Pajajaran yang dibawa Portugis;
- (3) Portugis bersedia membantu Kerajaan Sunda Pajajaran diserang Kesultanan Demak atau lainnya;
- (4) Sebagai rasa persahabatan Raja Sunda Pajajaran akan menghadiahkan 1.000 karung lada setiap tahun kepada Portugis.

Untuk memperingati dan menguatkan perjanjian itu dibuatlah tugu dari batu oleh Portugis di pinggir sebelah kiri Sungai Ciliwung (Hamka, 1976: 176; Hanna, 1988: 7).

Pada sisi lain, perjanjian persahabatan antara Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis mendapat tanggapan tidak simpatik dari Banten, yang sudah banyak menerima kehadiran Islam, sehingga kesetiaan Banten terhadap Kerajaan Sunda Pajajaran semakin menipis. Hal yang sama ditunjukkan pula oleh Demak. Ia menilai bahwa dengan masuknya Portugis ke Pulau Jawa akan berakibat fatal bagi kemerdekaan Nusantara secara keseluruhan, sehingga peristiwa persahabatan Kerajaan Sunda Pajajaran dengan Portugis telah memperbesar hasrat Kesultanan Demak untuk menguasai Kerajaan Sunda Pajajaran.

Untuk melumpuhkan kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran, Kesultanan Demak tidak langsung melakukan serangan frontal ke pusat kekuasaan⁴, tetapi terlebih dahulu ia harus menguasai Banten. Strategi ini diambil dengan pertimbangan bahwa secara sosio-psikologis, masyarakat Banten yang terbuka dan sudah cenderung menerima kehadiran Islam, ditambah dengan kebencian mereka terhadap Kerajaan Sunda Pajajaran yang telah berkolaborasi dengan Portugis, akan mempermudah Kesultanan Demak untuk menanamkan pengaruhnya, lebih-lebih bila melalui pendekatan emosi keagamaan. Secara geografis-ekonomis Banten, sebagai kota pelabuhan dan pangkalan strategis di Jawa Barat, merupakan akses dan aset yang sangat berarti bagi Kerajaan Sunda Pajajaran, seperti halnya Sunda Kalapa. Dengan menguasai Banten berarti salah satu sumber daya dan sumber dana Kerajaan Pajajaran sudah dikuasai (Muhsin Z., 1994).

Dalam upaya menguasai Banten, penguasa Demak, Sultan Trenggana, mengutus Sunan Gunung Jati⁵ beserta sejumlah pasukan Perang Kesultanan Demak sekitar tahun 1524-1525 (Ricklefs, 1992: 58) untuk menyerangnya. Tidak diperoleh informasi terjadinya perlawanan dari pihak Banten. Malah, yang terjadi adalah penguasa Banten menerima kehadiran Sunan

⁴Penundaan penyerangan ini kemungkinan didasarkan pada pertimbangan bahwa Kerajaan Sunda Pajajaran merupakan kerajaan kuat, baik secara militer maupun ekonomi. Menurut kesaksian Henrique Leme, petinggi Portugis di Malaka, ibu kota Kerajaan Sunda Pajajaran itu berpenduduk 50.000 orang, sedangkan jumlah tentara yang dimiliki kerajaan sebanyak 100.000 orang (Djajadiningrat, 1983: 83).

⁵ Terdapat beberapa kisah kontroversial mengenai tokoh ini antara yang mitos dan yang historis. Penjelasan lebih lanjut mengenai tokoh ini lihat Hoesen Djajadiningrat (1983); H.J. de Graaf dan Th. G.Th. Pigeaud (1985: 138-144).

Gunung Jati dan pasukannya serta membantu proses Islamisasi. Perkembangan selanjutnya, Sunan Gunung Jati berhasil mengambil alih pemerintahan kota pelabuhan tersebut pada tahun 1526. Kemudian pada tahun tersebut berdirilah Kesultanan Banten dan dijadikannya sebagai vasal Kesultanan Demak.

Setelah kota pelabuhan Banten berhasil dikuasai, langkah berikutnya, dalam upaya mengislamkan Jawa Barat, adalah menaklukkan Sunda Kalapa⁶, sebuah kota pelabuhan utama yang penting dan ramai yang dikuasai Kerajaan Pajajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, rencana perebutan (Sunda) Kalapa oleh Demak mendapat bantuan dari Banten sehingga tempat ini dijadikan pangkalan utama bagi Pasukan Demak-Cirebon.

Serangan terhadap Pelabuhan (Sunda) Kalapa dilakukan pada tahun 1527 yang melibatkan sekitar 1.452 orang prajurit di bawah pimpinan Fatahilah (Ekadjati *et al.*, 1990: 17). Perlawanan gigih yang diperlihatkan oleh pasukan Kerajaan Sunda tidak mampu membendung pasukan koalisi Cirebon-Banten-Demak sehingga pasukan Kerajaan Sunda mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut mengakibatkan pelabuhan Sunda Kalapa dapat dikuasai sepenuhnya oleh Pasukan Cirebon-Banten-Demak. Sebagai petunjuk bahwa penaklukan kota ini sangat penting adalah kota ini diberinya nama baru, Jayakarta atau Surakarta (keduanya bahasa Jawa yang berasal dari bahasa Sansakerta yang berarti 'jaya' dan 'makmur'). Peristiwa itu terjadi pada tahun 1527.

Penaklukan Banten dan Sunda Kalapa mempunyai arti penting bagi Kesultanan Demak karena beberapa alasan, yaitu:

⁶ Menurut Tome Pires, pelabuhan Sunda Kalapa, dengan muara Sungai Ciliwung, itu pada zamannya merupakan kota pelabuhan terpenting di Jawa Barat, lebih penting daripada Banten dan Cirebon (H.J. de Graaf dan Th.G.Th. Pigeaud, 1995: 146; Hanna, 1988: 16).

- 1) Penaklukan Banten dan Sunda Kalapa akan memudahkan penaklukan Kerajaan Sunda Pajajaran.
- 2) Banten dapat dijadikan tempat strategis bagi penyerangan pantai selatan Sumatera, Lampung, dan Palembang yang kaya akan cengkih dan lada, sementara penduduknya masih animis.
- 3) Dengan dikuasainya jalur pantai Jawa Barat yaitu Banten, Sunda Kalapa, dan Cirebon berakhirlah kekhawatiran Kesultanan Demak atas orang-orang Portugis di Pulau Jawa.
- 4) Banten dapat dijadikan pusat penyebaran Islam untuk penduduk di Jawa Barat dan sebagian Sumatera (Michrab dan A. Mujahid Chudari, 1990: 22).

Ambisi Kesultanan Demak untuk menaklukkan Kerajaan Sunda Pajajaran tidak sempat jadi kenyataan karena penguasa Demak, Sultan Trenggana, meninggal dunia (1548). Wafatnya sultan ini membuat Kesultanan Demak menjadi lemah. Pemerintahan penggantinya, Susuhunan Prawata (1546-1549) merupakan antiklimaks terhadap kejayaan sultan pendahulunya, Sultan Trenggana, yang telah menguasai sebagian besar Pulau Jawa (de Graaf dan Th.G.Th. Pigeaud, 1995: 91). Kondisi ini telah dimanfaatkan oleh Sultan Hasanudin (1552-1570), penguasa Banten kedua yang menggantikan ayahnya, Sunan Gunung Jati, yang pindah ke Cirebon (1552)⁷, untuk memerdekakan Banten lepas dari hegemoni Kesultanan Demak. Dengan demikian,

⁷ Waktu Sunan Gunung Jati benar-benar telah pindah dari Banten ke Cirebon, usianya telah lebih dari 60 tahun. Alasan mengapa ia meninggalkan Banten untuk menetap di Cirebon tidak diketahui dengan pasti. Namun begitu, kiranya dapat dimaklumi bila diingat bahwa ia – juga karena asal-usul istrinya dari Demak – lebih suka tinggal di tempat yang tidak terlalu jauh dari pusat kehidupan Islam di Jawa Tengah, yaitu Demak, daripada tinggal di sudut negeri yang paling barat (de Graaf dan Th.G.Th. Pigeaud, 1995: 142).

wilayah kekuasaan Banten di Pulau Jawa pada masa Sultan Hasanudin meliputi Banten dan Jayakarta, sedangkan di luar Pulau Jawa meliputi Lampung dan Bengkulu.

Sepeninggal Sultan Hasanudin (1570), Kesultanan Banten dipimpin oleh Maulana Yusuf (1570-1580). Hasrat untuk menaklukkan Kerajaan Sunda Pajajaran menjadi kenyataan pada masa pemerintahannya. Pada masa inilah, tepatnya tahun 1579, pasukan Banten yang dibantu oleh Cirebon berhasil menaklukkan Kerajaan Sunda Pajajaran sekaligus mengakhiri eksistensi Kerajaan Sunda tersebut.

Keberhasilan Kesultanan Banten menguasai Kerajaan Sunda Pajajaran (1579) merupakan perwujudan dari cita-cita lama, yakni sejak Kesultanan Demak memegang hegemoni atas Jawa pada masa Sultan Trenggana (1504-1546), kemudian dilanjutkan oleh Banten ketika sebagai vassal Kesultanan Demak pada masa Sunan Gunung Jati (1525-1552), dan Banten-merdeka pada masa pemerintahan Sultan Hasanudin dan Maulana Yusuf.

Menurut sumber tradisi, penyerangan Kesultanan Banten ke Kerajaan Sunda Pajajaran itu sedikitnya terjadi tiga kali; pertama, dilakukan oleh Sunan Gunung Jati pada masa Kerajaan Sunda Pajajaran di bawah pemerintahan Ratu Dewata Buana (1535-1551); kedua, dilakukan oleh Sultan Hasanudin pada masa Kerajaan Sunda Pajajaran di bawah pemerintahan Nilakendra (1551-1567); dan ketiga, dilakukan oleh Maulana Yusuf pada masa Kerajaan Sunda Pajajaran diperintah oleh Ragamulya (1567-1579) (Danasasmita, 1981: 78-81). Kenyataan itu mengisyaratkan betapa kuatnya Kerajaan Sunda Pajajaran; dalam kondisi yang teralienasi selama kurang lebih setengah abad baik secara ideologi, ekonomi, maupun politik ia masih menunjukkan kemampuan melakukan perlawanan. Malah, menurut sumber tradisi pula, kemenangan Kesultanan Banten atas Kerajaan Sunda Pajajaran itu dimungkinkan oleh pengkhianatan pegawai Kerajaan

Sunda Pajajaran itu sendiri (Djajadiningrat, 1983: 149; de Graaf dan Th.G.Th. Pigeaud, 1995: 153).

Sesudah kota kerajaan jatuh, raja beserta keluarganya “menghilang” (Djajadiningrat, 1983: 149). Sementara itu, seluruh kerajaannya “dihancurkan” dan penduduknya dibunuh atau diusir (Faes, 1902: 1)⁸.

Dengan jatuhnya Kerajaan Sunda Pajajaran, maka lenyaplah kerajaan besar terakhir yang menganut Hindu di Pulau Jawa. Ini pun berarti bahwa wilayah kekuasaan Kesultanan Banten dengan sendirinya meluas, yakni ditambah dengan wilayah yang ditaklukkannya. Namun demikian, dalam kenyataannya tidak semua bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran dikuasai Kesultanan Banten, tetapi daerah itu dibagi dua dengan Karawang sebagai batas. Sebelah barat Karawang diambil oleh Kesultanan Banten dan sebelah timur Karawang diserahkan kepada Kesultanan Cirebon (Djajadiningrat, 1983: 98; Faes, 1902: 1). Pembagian ini dimungkinkan mengingat ada hubungan geneologis antara penguasa Kesultanan Banten dan Cirebon. Selain itu, baik langsung maupun tidak, Kesultanan Cirebon telah turut membantu, paling tidak, dalam memperlemah kondisi Kerajaan Sunda Pajajaran.

Setelah ibu kota kerajaan Sunda Pajajaran ditaklukkan, tampaknya penguasa Banten “menerlantarkan” wilayah itu. Hal ini, boleh jadi, disebabkan karena secara geografis wilayah bekas ibu kota Kerajaan Sunda Pajajaran yang terletak di pedalaman itu dianggap kurang strategis bagi aktivitas (khususnya perekonomian) Kesultanan Banten yang bercorak maritim. Di samping itu, sumber daya manusianya pun, terutama yang

⁸ Faes (1902: 1) menggambarkan kondisi Kerajaan Pajajaran saat dikalahkan oleh Kesultanan Banten itu sebagai “*het geheel rijk verwoest en de bevolking vermoord of verdreven werd*”.

bersedia masuk Islam, kemungkinan lebih banyak direkrut untuk kepentingan pembentukan dan memperkuat tentara Kesultanan Banten. Terdapat kecenderungan pada masa lalu bahwa pemindahan penduduk dari daerah yang ditaklukkan ke wilayah pihak yang menang kadang-kadang merupakan salah satu tujuan perang (Ricklefs, 1992: 24).

Kerajaan Sumedanglarang sebagai Tunas Pajajaran

Salah satu kerajaan yang dianggap sebagai *vassal* Kerajaan Pajajaran adalah Kerajaan Sumedanglarang. Di kerajaan ini, sekitar tahun 1579 terjadi pergantian kepemimpinan. Ratu Pucuk Umum menyerahkan tahta kerajaan kepada anaknya, Prabu Geusan Ulun (1579-1610). Setelah mengetahui Kerajaan Sunda runtuh, Prabu Geusan Ulun menyatakan dirinya sebagai penerus kekuasaan Kerajaan Pajajaran dan seluruh bekas wilayah kerajaan itu diklaim sebagai wilayah Kerajaan Sumedanglarang yang meliputi seluruh wilayah Jawa Barat minus Banten, Jayakarta, dan Cirebon (Surianingrat, 1983: 20).

Menurut salah satu historiografi tradisional, penyerahan kekuasaan Kerajaan Pajajaran kepada Kerajaan Sumedanglarang berlangsung melalui penyerahan mahkota emas raja Kerajaan Sunda kepada Prabu Geusan Ulun. Mahkota itu diserahkan oleh 4 orang *kandaga lante* (semacam kepala yang lebih tinggi satu tingkat daripada *cutak/camat*) Kerajaan Sunda Pajajaran.⁹ Semua *kandaga lante* itu tidak kembali lagi ke Kerajaan Sunda karena memang telah runtuh. Mereka terus berbakti ("*geusan ulun kumawula*"; *geusan* = tempat, *ulun kumawula* = bekerja) di Sumedanglarang. Penyerahan mahkota tadi secara simbolis

⁹ Keempat *kandaga lante* itu adalah Sanghiang Hawu (Sayanghawu) atau Jayaperkosa, Batara Dipati Wiradidjaja (Nanggan), Sanghiang Kondanghapa, dan Batara Pancar Buana (Terongpeot).

berarti bahwa Sumedanglarang menjadi penerus Kerajaan Sunda (Suryaningrat, 1983: 20-21 dan 30).

Periode Geusan Ulun ini merupakan periode sangat penting dalam sejarah Tatar Sundamengingat dua hal. Pertama, pada masa Geusan Ulun dinobatkan menjadi raja terjadi keruntuhan kerajaan Pajajaran akibat serangan Kesultanan Banten tahun 1579. Kedua, Prabu Geusan Ulun merupakan raja terakhir dari Dinasti Kerajaan Sumedanglarang. Bahkan, bisa dikatakan bahwa Prabu Geusan Ulun ini sebagai raja terakhir kerajaan Sumedanglarang. Selanjutnya pemerintahan di Sumedang berbentuk kabupatian yang dipimpin oleh seorang bupati.

Kerajaan Sumedanglarang, yang ketika Kerajaan Sunda Pajajaran berjaya, sering dianggap sebagai kerajaan *vassal*, berada di bawah pengaruh kebesaran Kerajaan Sunda Pajajaran. Namun, ketika Kerajaan Sunda Pajajaran runtuh akibat serangan Kesultanan Banten, maka Kerajaan Sumedanglarang tidak hanya menjadi kerajaan “merdeka”, tetapi juga dianggap mewarisi kebesaran Kerajaan Sunda Pajajaran. Luas wilayah Kerajaan Sumedanglarang adalah seluas bekas wilayah Kerajaan Pajajaran, yaitu seluruh wilayah Jawa Barat minus Banten, Jayakarta, dan Cirebon. Bahkan, daerah-daerah yang ketika Kerajaan Pajajaran melemah akibat peperangan dengan Banten berusaha melepaskan kesetiannya, kembali ditaklukkan oleh pasukan Prabu Geusan Ulun. Daerah-daerah itu adalah Karawang, Ciasem, Pamanukan, dan Indramayu (Suryaningrat, 1983: 22).

Sikap Kerajaan Sumedanglarang seperti itu mengundang kemarahan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten, sebagai pemenang dalam peperangan dengan Kerajaan Sunda Pajajaran, menganggap dirinya menjadi penguasa yang berhak atas seluruh wilayah yang menjadi bawahan Kerajaan Sunda Pajajaran, termasuk di dalamnya Sumedanglarang. Oleh karena itu, bisa

dipahami bila Kerajaan Sumedanglarang menjadi target serangan dan penaklukan Kesultanan Banten.

Prabu Geusan Ulun mempunyai tiga istri. Yang pertama ialah Nyi Mas Cukang Gedeng Waru. Dari perkawinan ini Prabu Geusan Ulun mempunyai 14 anak. Salah satunya adalah Pangeran Rangga Gede (sebagai anak sulung).

Istri yang kedua adalah Ratu Harisbaya. Dari perkawinan ini Prabu Geusan Ulun tidak punya anak. Raden Suriadiwangsa bukan anak dari Prabu Geusan Ulun, melainkan anak dari Pangeran Girilaya. Istri yang ketiga adalah Nyi Mas Pasarean. Dari perkawinan ini Prabu Geusan Ulun punya satu anak yaitu Nyi Mas Demang Cipaku (Anonim, 1996: 25). Prabu Geusan Ulun wafat tahun 1601.

Munculnya Nama Priangan

Sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa secara geneologis Raden Suriadiwangsa bukanlah putera kandung Prabu Geusan Ulun. Dia adalah putera Pangeran Girilaya dari pernikahannya dengan Ratu Harisbaya. Ratu Harisbaya diperistri oleh Prabu Geusan Ulun setelah ia bercerai dengan Pangeran Girilaya. Ketika bercerai dengan Pangeran Girilaya, Ratu Harisbaya sedang hamil dua bulan. Meskipun demikian, Raden Suriadiwangsa diperlakukan oleh Prabu Geusan Ulun seperti halnya seorang anak kandung; sehingga ketika Prabu Geusan Ulun wafat (1601) Raden Suriadiwangsa mewarisi kekuasaan ayah tirinya (*Babad Martanagara*). Namun, Raden Suriadiwangsa ini tidak mewarisi seluruh wilayah Kerajaan Sumedanglarang.

Setelah Prabu Geusan Ulun wafat, Kerajaan Sumedanglarang dibagi dua. Kerajaan yang pertama diperintah oleh Pangeran Rangga Gede, putera sulung dari Nyi Mas Cukang Gedeng Waru. Pusat kotanya terletak di Dayeuh Luhur. Kerajaan

kedua dipimpin oleh Pangeran Suriadiwangsa, putera Harisbaya dari Pangeran Girilaya. Ibu kotanya terletak di Tegal Kalong.

Sepeninggal Prabu Geusan Ulun terjadi beberapa perubahan penting dalam status pemerintahan dan kewilayahan. Hal ini terjadi berkait dengan semakin menguatnya kesultanan Mataram.

Mengenai semakin menguatnya kesultanan Mataram perlu dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 1614 VOC mengirim utusan ke Mataram, yang waktu itu diperintah oleh Sultan Agung, putera Sultan Seda Krpyak (1602-1613). Kepada utusan VOC ini Sultan Agung (1613-1645) menyampaikan pretensi (*pretension*), yaitu klaim bahwa seluruh wilayah Jawa Barat kecuali Banten dan Cirebon berada di bawah kekuasaannya (Suryaningrat, 1983: 34).

Meskipun pretensi Kesultanan Mataram ini merupakan klaim sepihak, hal itu membuat Raden Suriadiwangsa “ketakutan”. Jika tidak memosisikan diri sebagai kerajaan bawahan, Raden Suriadiwangsa khawatir Kesultanan Mataram akan menyerangnya. Itulah antara lain yang mendorong Raden Suriadiwangsa, atas kemauan sendiri, pada tahun 1620 datang ke Mataram menemui Sultan Agung¹⁰ untuk menyatakan pengakuan bahwa Sumedang menjadi bawahan Mataram (*Arsip Koleksi Asikin Nataneggara*).

Kedatangan Pangeran Suriadiwangsa ini disambut baik oleh Sultan Agung. Konon, karena “ketulusan hati” Pangeran Suriadiwangsa yang mengakui hegemoni Kesultanan Mataram inilah, wilayah yang dikuasai oleh Pangeran Suriadiwangsa dinamai “*Prayangan*” (berarti “tulus-ikhlas”); selanjutnya menjadi **Priangan**. Penghargaan atas kedatangan Pangeran

¹⁰ Sebenarnya Raden Suriadiwangsa ini mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dari pihak ibunya, Ratu Harisbaya. Ratu Harisbaya adalah sepupu Sultan Seda Krpyak, ayah Sultan Agung.

Suriadiwangsa dan ketulusan hatinya mengakui hegemoni Mataram, Sultan Agung memberi gelar Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata (selanjutnya lebih populer dengan sebutan Rangga Gempol I). Status Sumedang pun berubah, tidak lagi sebagai kerajaan, tapi sebagai kabupaten yang menjadi bagian dari Kesultanan Mataram. Dengan demikian, Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata pun tidak lagi sebagai raja, tapi sebagai bupati. Begitu juga wilayah-wilayah yang semula menjadi bawahan Sumedanglarang diberi status sebagai kabupaten, yang masing-masing dipimpin oleh seorang bupati. Akan tetapi, posisi Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata, selain sebagai bupati yang memimpin pemerintahan Kabupaten Sumedang, juga sebagai kordinator para bupati lainnya yang ada di wilayah Priangan, yang dikenal dengan istilah Bupati Wedana.

Priangan di bawah Penguasaan VOC, Hindia Belanda, dan Inggris

Wilayah Priangan, karena potensi alamnya, menjadi ajang perebutan di antara tiga kekuatan, yaitu Banten, Mataram, dan VOC. Pihak Banten tidak berhasil menanamkan pengaruhnya ke pedalaman Priangan; sedangkan Mataram, meskipun sempat melakukan penetrasi politik ke wilayah Priangan pada tahun 1620-an, namun tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pemerintahan di Priangan; akhirnya VOC menaruh perhatian besar terhadap Priangan karena ada potensi untuk dikembangkan sebagai daerah pedalaman Batavia (Kartodirdjo, 1987: 136). Potensi alam Priangan sangat cocok bagi pengembangan usaha-usaha perkebunan tanaman-tanaman yang dibutuhkan pasar dunia. Untuk mendapatkan wilayah Priangan itu, VOC harus merebutnya dari Mataram serta harus mampu menjinakkan Banten.

Satu demi satu kerajaan di Pulau Jawa jatuh ke tangan VOC; pertama-tama Mataram, kemudian Banten. Pergolakan dan konflik internal dalam masing-masing kerajaan merupakan faktor yang memungkinkan penetrasi VOC semakin mendalam dan meluas. Begitu pula dengan meninggalnya tokoh kuat kerajaan, muncullah periode penuh konflik intern, perebutan tahta, dan pemberontakan. Kesemua itu dijadikan kesempatan oleh VOC memperoleh keuntungan melalui bantuan bersyarat yang diberikan kepada salah satu pihak.

Pergolakan serta konflik intern kerajaan sering mengundang campur tangan VOC. Keterlibatan VOC ini berbahaya karena akan menimbulkan ketergantungan, sehingga pada gilirannya nanti membahayakan kepentingan dan kedudukan kerajaan sendiri. Dalam konteks seperti itulah akhirnya Mataram dan Banten jatuh ke tangan VOC. Dengan demikian, menjelang berakhirnya abad ke-17, berakhir pulalah kemerdekaan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa.

Kekuasaan Mataram atas Priangan berakhir dengan adanya perjanjian antara Mataram dengan VOC. Perjanjian itu terjadi dalam dua tahap, yaitu tanggal 19-20 Oktober 1677 dan 5 Oktober 1705. Dalam perjanjian pertama disebutkan bahwa Mataram menyerahkan wilayah Priangan Timur kepada VOC dan dalam perjanjian yang kedua Mataram menyerahkan wilayah Priangan Tengah dan Priangan Barat (van Rees, 1869: 50-55). Penyerahan wilayah Priangan kepada VOC dilakukan Mataram sebagai balas jasa kepada VOC yang telah membantu menyelesaikan perebutan kekuasaan di Mataram. Pengambilalihan wilayah Priangan tidak berlangsung cepat. Baru pada tanggal 15 November 1684, Komandan Jacob Couper dan Kapten Jochum Michiels menangani daerah Priangan atas perintah Gubernur Jenderal Johannes Camphuijs.

Setelah VOC bubar (1799), kekuasaan atas Pulau Jawa diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Jenderal H.W. Daendels pada tahun 1808 membagi Pulau Jawa atas sembilan *prefectur*. Setiap *prefectur* dipimpin oleh seorang *prefect* (van Rees, 1869: 110-113). *Prefectur* Priangan waktu itu terdiri atas empat kabupaten, yaitu Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang. Wilayah ini dikenal sebagai *Prefectuur Preanger-Regentschappen*. Dibentuknya pembagian wilayah administratif seperti ini dimaksudkan selain untuk kepentingan politik dan keamanan juga untuk kepentingan ekonomi. Tampaknya, kepentingan ekonomi sering jadi pertimbangan utama sehingga banyak mempengaruhi keputusan-keputusan lainnya. Malah, sukses tidaknya produksi kopi di tiap-tiap kabupaten mempengaruhi eksistensi kabupaten itu sendiri.

Pada masa pemerintahan Inggris (1811-1816), Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles memperkenalkan istilah keresidenan. Sejak saat itu dikenal juga istilah residen sebagai pemimpin keresidenan yang berkedudukan di ibu kota keresidenan. Pada masa ini, Pulau Jawa dibagi atas 16 keresidenan, salah satu di antaranya adalah Keresidenan Priangan. Pembagian ini ditetapkan pada Resolusi tertanggal 10 Agustus 1815 (van Rees, 1869: 129). Ibu kota Keresidenan Priangan waktu itu adalah Cianjur. Pada tahun 1864 ibu kota Keresidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung berdasarkan Besluit bertanggal 17 Agustus 1864 no. 18 (de Klein, 1931: 12, 92). Keresidenan Priangan pada masa ini terdiri atas lima kabupaten, yaitu Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang, dan Sukapura.

Lingkungan Geografi Keresidenan Priangan

Priangan¹¹ sebagai nama wilayah geografis di Jawa Barat sudah dikenal sejak abad ke-17. Nama Priangan digunakan hingga sekarang meskipun luas dan batas-batas wilayah ini berubah-ubah.

Luas wilayah Keresidenan Priangan pada abad ke-19 kurang lebih seperenam Pulau Jawa (kira-kira 21.524 km²). Batas-batas wilayah Keresidenan Priangan adalah sebelah utara Keresidenan Batavia dan Cirebon, sebelah timur Keresidenan Cirebon dan Banyumas, sebelah selatan dan barat daya adalah Samudera Hindia, dan sebelah barat adalah Keresidenan Banten.

Batas-batas alam wilayah ini adalah sebelah utara rangkaian pegunungan Salak-Gede, Burangrang, Tangkuban-perahu; sebelah timur Sungai Citanduy; sebelah barat adalah Pelabuhanratu (*Wijnkoopsbaai*) dan Ciletu (*Zandbaai*), dan sebelah tenggara Selat Pananjung, dan di sebelah selatan dan tenggara adalah Cilauteureun (Stibbe, 1919: 503).

Wilayah Priangan sangat subur karena merupakan daerah vulkanis yang dibentuk oleh gunung-gunung berapi dengan ketinggian antara 1.800 hingga 3.000 m di atas permukaan laut. Gunung-gunung tersebut di antaranya adalah Gunung Gede, Gunung Galunggung, Gunung Papandayan, Gunung Salak, Gunung

¹¹Kata "priangan" memiliki beberapa arti (Van Rees, 1880: 1; Hagemann, 1869: 180-181). Satu di antaranya adalah bahwa kata *priangan* berasal dari *kataprayangan* yang berarti "to surrender with a holy heart". Pengertian ini dikaitkan dengan menyerahnya Pangeran Aria Suriadiwangsa, penguasa Sumedanglarang, kepada raja Mataram (Ekadjati, 1982: 63). Pendapat lain mengatakan bahwa kata *priangan* terdiri atas kata *hiang* atau *rahiyang*, kemudian mendapat awalan *para* dan akhiran *an* atau awalan *pa* dan akhiran *an*. Pengertian kata ini adalah "the residence of the God", "verblijf van de geesten", atau "the residence of an ancestor that has to be honoured" (Bezemer, 1921: 437).

Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Guntur, dan Gunung Cikuray. Stibbe (1919: 503) menyebutkan bahwa hampir tidak ada di dunia ini sebuah wilayah dengan jumlah pegunungan dan gunung berapi sebanyak dan sebesar seperti di Priangan.

Konsekuensi dari banyaknya gunung itu adalah Priangan pun memiliki banyak sungai.¹² Sungai-sungai di Priangan bermuara ke Laut Jawa dan Samudera Indonesia (*Indische Ocean*). Sungai-sungai yang mengalir ke Samudera Indonesia adalah, dari timur ke barat, Sungai Citanduy.¹³ Sungai-sungai penting yang bermuara ke Laut Jawa adalah Citarum¹⁴ dan Cimanuk¹⁵. Di samping itu, terdapat juga rawa (*swamp*) di muara Sungai Citarum, terkenal dengan nama Rawalakbok, di sebelah tenggara Banjar antara Sungai Citanduy dan Ciseel. Selanjutnya terdapat juga *situ* (*lakes*), yaitu Situ Bagendit di sebelah timur Garut, Situ Cileunca di Pangalengan, Talaga Patenggang di sebelah barat Gunung Patuha, Talaga Bodas di kawah Gunung Talagabodas, dan Talagawarna di kaki Gunung Gede. Wilayah Priangan pun memiliki tidak kurang dari 25 sumber air panas. Kondisi alam

¹²Di Priangan terdapat banyak sungai dan selokan. Sebelum masyarakat mengenal teknik pengelolaan air mereka hampir selalu tinggal dekat dengan sumber-sumber air. Oleh karena itu, sangat logis jika begitu banyak nama tempat yang mengindikasikan air, seperti *ranca*, *situ*, *leuwi*, *pasir*, *ci*, *rawa*, dan sebagainya.

¹³Dengan aliran sungai-sungai kecil seperti Ciseel, Cijulang, Cimedang, Ciwulan, Cilangla, dan Cipatujah (di *afdeeling* Tasikmalaya); Cisanggiri, Cikondang, dan Cilaki (di *afdeeling* Garut); Cidaun, Cisadea, Cibuni, Cijampang, dan Cibalapulang (di *afdeeling* Cianjur); Cikaso, Cikarang dan Ciletu (di *afdeeling* Sukabumi).

¹⁴Dengan aliran anak-anak sungai Citarik, Cikapundung, Cimeta, Cisangkuy, Cimahi, Cihea, Ciwidey, dan Cigundul.

¹⁵Hulu sungainya terdapat di lembah sebelah tenggara Gunung Papan-dayan, mengalir sepanjang Garut, Baluburlimbangan, Sumedang, dan Indramayu.

seperti itu menjadikan wilayah Priangan memiliki tanah yang sangat subur, sehingga menjadi daya dukung yang cukup tinggi sebagai penopang kebutuhan hidup penduduknya (Stibbe, 1919: 504).

Gambaran yang lebih penting dari geografi fisik Priangan adalah terdapatnya tanah lembah (*basin*) dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Terdapat dua lembah yang penting, yaitu di Garut dan Bandung. Lembah-lembah itu terbentuk berkat adanya gunung-gunung berapi. Lembah ketiga terdapat di sepanjang aliran Sungai Cimanuk (Hoadley, 1994: 6). Pada satu sisi, air merupakan prasyarat yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pada sisi lain tempat-tempat yang dekat dengan air/sungai memiliki tingkat kesuburan yang cukup tinggi, dan akibatnya tanah-tanah landai seperti itu menjadi tempat konsentrasinya penduduk. Tanah-tanah lembah yang subur ini pun menjadi lumbung padi bagi penduduknya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa di Priangan terdapat dua tipe desa (*village*), yang terdapat di dataran rendah (*lowland*) dan dataran tinggi (*upland*). Pertama, petani yang tinggal di desa-desa pelataran rendah biasanya tinggal di sepanjang sungai atau jalan, dan berbatasan dengan sawah atau ladang. Di tempat itu terdapat rumah-rumah sebagai tempat tinggal dan bangunan-bangunan lainnya seperti masjid, kandang ternak, lumbung padi (*leuit*); masing-masing letaknya berdekatan. Penduduknya biasanya terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang disebut kampung.

Desa-desa yang ada di datara tinggi penduduknya sering tidak permanen (*unsettled*). Mereka tidak tinggal di tempat yang tetap, tapi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya mendekati tanah yang subur. Keadaan seperti ini berpengaruh juga terhadap model rumah yang mereka bangun. Mereka tidak memerlukan rumah permanen, tapi rumah yang sederhana saja.

Penduduk di pemukiman seperti itu strukturnya sangat sederhana. Di samping itu, di daerah-daerah pedalaman Priangan, penduduknya hidup sebagai peladang (*swiddencultivators*). Mereka membuka hutan dan semak belukar, membakarnya, dan menanaminya dengan padi dan tanaman-tanaman palawija.

Setelah tanah itu dianggap berkurang nutrisinya sehingga tidak subur lagi (biasanya setelah 2 sampai 3 tahun) mereka terpaksa meninggalkan perkampungan itu, mencari dan membuka tanah baru. Begitu seterusnya (Elson, 1994: 10).

Wilayah Priangan mayoritas dihuni oleh etnis Sunda. Oleh karenanya, Priangan biasanya disebut juga **Pasundan** (pa-sunda-n; berarti tempat orang-orang Sunda tinggal). Orang Sunda kadang-kadang disebut juga '*orang gunung*' (*mountain people*) oleh penduduk yang tinggal di dataran rendah (Stibbe, 1921: IV: 23). Seiring dengan perjalanan waktu, arus masuk etnis lain ke Priangan terjadi, seperti dari etnis Jawa, Bugis, Malayu, Cina, dan Eropa (Raffles, 1978, I: 63-64).

Orang Sunda sebagaimana digambarkan oleh Raffles bercirikan "ras" pegunungan (*mountainous race*). Mereka berbadan pendek, kuat, keras, dan lebih aktif daripada penduduk di pantai dan distrik-distrik sebelah timur.

Data tertua yang tersedia tentang penduduk Priangan adalah data tahun 1808. Pada tahun ini penduduk Priangan berjumlah 195.000 orang¹⁶ Kemudian pada 1812 menurun menjadi 180.000 orang¹⁷ (Boomgaard dan Gooszen, 1991: 97).

¹⁶Sebelum tahun 1808, data yang tersedia hanya untuk tahun 1795 dan 1802 untuk Jawa Barat (tanpa rincian tiap keresidenan), berturut-turut sebanyak 914.000 dan 906.000 (Boomgaard dan A.J. Gooszen, 1991).

¹⁷Penduduk Priangan pada awal abad ke-19 dilaporkan oleh Raffles (1978, I: 63), namun data Priangan digabungkan dengan Batavia. Raffles menginformasikan bahwa jumlah penduduk Batavia dan

Tiga tahun kemudian, jumlah itu naik menjadi 188.000 orang,¹⁸ dan pada tahun 1817 menjadi 191.000 orang. Dari tahun 1820 hingga 1895 terdapat data penduduk pribumi Priangan per tahun yang dikumpulkan oleh Boomgaard dan Gooszen.¹⁹ Data itu mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk Priangan adalah 2,8% untuk abad ke-19 secara keseluruhan (3,2% untuk tahun 1808-1850 dan 2,4% untuk tahun 1850-1900²⁰ (lihat Grafik I).

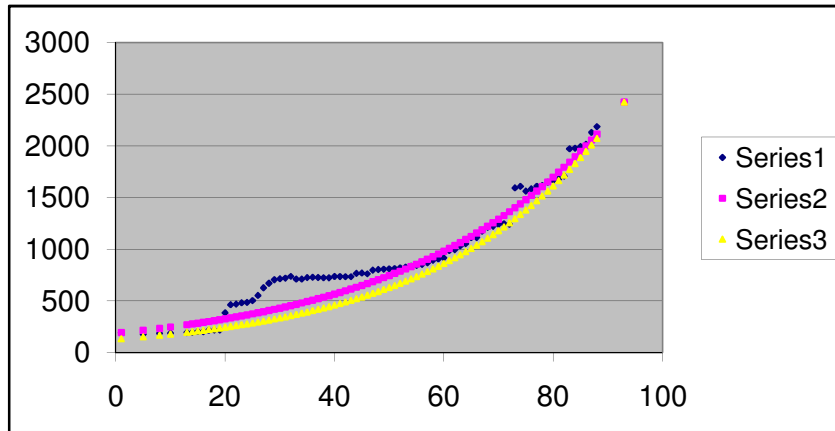
Priangan pada tahun 1812-1813 adalah 203.513 orang terdiri atas 34 orang Eropa, 203.042 Pribumi, 158 Cina, 177 Malayu dan Bugis, dan 102 budak (*slaves*). Data Raffles ini berbeda dengan yang diberikan Boomgaard and Gooszen. Yang terakhir ini mencatat bahwa jumlah penduduk Priangan dan Batavia pada tahun 1812 sebanyak 324.460 orang.

¹⁸Penduduk Priangan pada tahun 1815 berjumlah 243.628 orang, terdiri atas 180 orang Eropa, 243.268 Pribumi, dan 180 Cina (Raffles, 1978, I: 64).

¹⁹P. Boomgaard dan A.J. Gooszen, "Population Trends 1795-1942", *Changing Economy in Indonesia*; Vol. 11 (Royal Tropical Institute, KIT, Amsterdam, 1991).

²⁰Angka didasarkan pada TABLE II diolah dengan rumus eksponensial.

GRAFIK I
JUMLAH TOTAL PENDUDUK PRIBUMI PRIANGAN
ABAD KE-19



Data diolah dari Boomgaard dan Gooszen (1991: 93-137)

Tingkat pertumbuhan penduduk seperti itu berkorelasi positif dengan tingkat kelahiran dan kematian. Tingkat rata-rata kelahiran dan kematian tiap tahun adalah 2,5% dan 1,8% secara berturut-turut selama abad ke-19 (2,9% dan 1,3% untuk 1823-1850; 2,1% dan 2,04% selama tahun 1850-1894).

Terjadinya fluktuasi penduduk seperti itu disebabkan oleh terjadinya fertilitas, mortalitas, dan migrasi.²¹Penduduk yang tinggal dan menetap di dataran rendah atau penduduk di pegunungan yang berpindah-pindah, ada dalam ketidakpastian dan ancaman kematian, baik karena sebab alamiah atau sebab

²¹Seperti diketahui contoh dari migrasi sirkuler adalah *bujang* yang secara reguler direkrut sebagai tenaga buruh di perkebunan gula dan tanah-tanah partikular sekitar Batavia. Status *bujang* ini tidak jelas (Elson, 1994: 11).

lainnya. Penyakit, bencana alam, tindakan destruktif dan kekejaman manusia, ditambah lagi dengan faktor-faktor ekonomi telah menyebabkan penduduk Priangan turun naik. Penyakit, seperti kolera, cacar, malaria, penyakit kelamin, dan demam telah menjadi penyebab banyaknya penduduk yang meninggal dunia.²² Pada tahun 1823 dilaporkan bahwa banyak penduduk yang bermigrasi (*in-migration*) ke Priangan, sebagian di antaranya karena melarikan diri dan menghindari dari tindakan penguasa yang menindas (*AJV Priangan 1823*).

Tanah pertanian di Priangan dapat dikelompokkan atas dua kategori besar; tanah yang diairi langsung dari selokan atau sungai, dan tanah yang mengandalkan air hujan. Jenis tanah yang pertama adalah sawah, yang kedua adalah *tegal* atau *gaga*.²³ Di sawah-sawah ditanam padi.

Sawah pun terbagi dua jenis berdasarkan bagaimana ia diairi. Ada sawah yang diairi baik langsung dari selokan atau sungai maupun melalui irigasi. Ada juga sawah yang hanya mengandalkan air hujan, disebut *sawah tadahan*. Tanah di lereng bukit, biasanya dibuat sengked (*terraces*). Di tanah tegalan yang biasanya di dataran tinggi, metode tertentu penanaman kadang-

²²Di Priangan 348 orang dilaporkan tewas karena diterkam harimau antara tahun 1828 dan 1829 (Elson, 1994: 11; *AV Priangan 1828 and 1829, AD, Priangan 2, AN*).

²³ Van der Meer (1986: 32-33) membedakan sawah (*wet-field cultivation*) ke dalam dua kategori: yang tergantung pada air hujan adalah *sawah tadahan*, tanah di pinggiran bukit (*hillside terraces*), dan tanah yang diairi oleh air irigasi yang dialirkan melalui saluran ke lahan yang ditanami, dikenal dengan nama *sawah sorotan*. Dia juga membedakan tanah kering ke dalam *tegal*, *gaga*, dan *ladang*. Tanah *tegal* terutama mengacu ke tanah yang tidak disengked (*unterraced fields*) atau tanah di pelataran terbuka dan rata. *Gaga* mengacu ke lahan kering yang tidak disengked secara permanen. *Gaga* adalah tanah ladang yang permanen.

kadang diterapkan. Bersama-sama dengan penanaman padi ditanam juga tanaman-tanaman palawija. Di Priangan teknik ini biasanya hanya diterapkan untuk benih yang ditanam di bidang tanah yang baru dibuka (Raffles, 1978, I: 115-117).

Perbandingan rata-rata antara luas sawah dan tegalan di Priangan pada tahun 1815 adalah 44 *bau* dan 51,9 *bau*²⁴ (Alson, 1994: 5). Jika luas sawah per desa di Priangan dibandingkan dengan di daerah lain di Jawa pada tahun 1815, Priangan berada di peringkat ke tiga setelah Jepara-Juana dan Semarang. Mengenai luas *tegalan*, Priangan berada pada peringkat pertama, sementara Basuki dan Semarang berada pada peringkat kedua dan ketiga. Persentase *sawah* terhadap luas total tanah yang ditanami adalah sangat kecil, sehingga luas sawah di Pringan terendah di Pulau Jawa (lihat Table I).

TABEL I
RATA-RATA DISTRIBUSI SAWAH DAN TEGAL
DI JAWA TAHUN 1815 (*bau*)

KERESIDENAN	SAWAH	TEGAL	PERSENTASE SAWAH DARI TOTAL TANAH YANG DITANAMI
Banyuwangi	22,0	3,2	87,5
Besuki	34,1	30,9	52,5
Cirebon	38,2	5,8	86,8
Gresik	43,4	5,1	89,5
Jepara dan Grobogan	25,6	2,5	91,1
Jepara and Juana	65,8	5,8	91,9
Kedu	11,1	8,6	56,3
Pekalongan	19,9	1,3	93,9

²⁴ 1 *bau* = 7096.5 m².

Priangan	44,0	51,9	45,9
Rembang	49,7	6,5	88,4
Semarang	61,3	7,2	89,5
Surabaya	25,1	2,0	92,6

Sumber: Alson, 1994: 5.

Oleh karena itu, mata pencaharian hidup yang utama penduduk Priangan pada masa-masa awal adalah pertanian huma (*swidden agriculture*) atau bertani pada tanah kering (*berladang*, atau *ngahuma*, Sunda), dan pada periode yang kemudian mereka bermatapencaharian dengan mengerjakan sawah (Burger, 1970: 119). Hingga pertengahan abad ke-19, berladang masih merupakan pilihan masyarakat Priangan. Budaya penanaman padi di sawah baru berkembang secara luas ketika Mataram mengontrol wilayah Priangan ini. Di beberapa daerah sawah-sawah dibuka, misalnya di Ciawi (Bogor), Bandung, Garut, Cianjur, dan Sumedang. Alasan utama terlambatnya budaya bersawah adalah kurangnya penduduk di wilayah ini,²⁵ dan kenyataan pun menunjukkan bahwa pengaruh India di wilayah ini pun sangat kurang.²⁶ Kurangnya jumlah penduduk berkorelasi dengan

²⁵Secara teoretis, proporsi tanah yang ditanami yang berupa sawah umumnya bergantung pada tiga variable utama: jumlah penduduk, ketersediaan air, dan tenaga manusia. Membuka dan memelihara sawah cukup rumit dan perlu tenaga buruh operasional yang intensif, menuntut suplai air yang memadai dan terprediksi, dan sebagainya (Elson, 1994: 6). Dalam kasus Priangan total penduduk pada 1815 adalah 188.000, sementara luas wilayah sekitar 21.524 km². Dengan demikian tingkat densitas penduduk adalah 8,7 per km². Air cukup tersedia. Akan tetapi, karena rendahnya kemampuan sistem irigasi jumlah air yang banyak itu tidak efektif untuk kepentingan pertanian.

²⁶Dalam bukunya, Van der Meer (1986) mendiskusikan sejarah *sawah* di Jawa. Dia bersimpulan bahwa sistem ber-*sawah* sudah terbentuk sebelum datangnya pengaruh India. Simpulan ini didukung oleh fakta

praktik berhuma, karena untuk menanami bidang tanah huma yang luas bisa dilakukan oleh jumlah orang yang sedikit (Wessing, 1978: 8).

Konsumsi utama penduduk adalah nasi/padi yang ditanam terutama di musim hujan. Berikutnya adalah jagung, terutama ditanam di daerah yang lebih tinggi, atau di tanah-tanah yang tidak cocok ditanami padi (Raffles, 1978, I: 34; Elson, 1994: 6). Di lahan-lahan seputar pemukiman penduduk, biasanya petani, menanam sayur-sayuran dan pohon-pohon buah seperti pisang, kelapa, kacang-kacangan, dan sebagainya.

bahwa semua istilah pertanian, juga gelar (*tittles*) berbagai pengelola pertanian adalah bahasa Jawa. Pengaruh India diduga hanya berkait dengan metode pengolahan sawah.